



Article Informations
Corresponding Email:
hendrimarwan3@gmail.com

Received: 06/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ARMENIA TERHADAP TURKI TAHUN 2020-2024

Hendri Marwan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pada tahun 2021 Armenia mulai melakukan proses normalisasi hubungan diplomatik dengan Turki setelah lebih dari tiga dekade hubungan kedua negara membeku akibat permasalahan sejarah, termasuk genosida Armenia dan konflik berkepanjangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam konteks tersebut, normalisasi hubungan dengan Turki menjadi bagian dari strategi baru kebijakan luar negeri Armenia untuk menghindari kerugian lebih besar secara keamanan, ekonomi, dan diplomatik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan di balik alasan dibalik normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Armenia terhadap Turki pada tahun 2021–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder seperti dokumen resmi, pernyataan pemerintah, laporan kebijakan, serta analisis media dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi yang dilakukan oleh Armenia didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu ancaman keamanan, ekonomi, dan politik atau diplomatik yang berasal dari Turki. Namun penelitian ini melihat pengaruh ancaman politik atau diplomatik tidak sebesar dengan ancaman lainnya.

Kata Kunci: Normalisasi, Diplomatik, Ancaman, Keamanan, Ekonomi, Politik

Abstract

In 2021, Armenia began the process of normalizing diplomatic relations with Türkiye after more than three decades of frozen ties due to historical disputes, including the Armenian Genocide and the prolonged conflict in the Nagorno-Karabakh region. In this context, normalization with Türkiye became part of Armenia's new foreign policy strategy aimed at avoiding greater losses in terms of security, economy, and diplomacy. This research aims to analyze the underlying reasons behind Armenia's decision to normalize diplomatic relations with Turkey during the period of 2021–2024. The study employs a qualitative method, using data collection techniques through literature review of both primary and secondary sources, including official documents, government statements, policy reports, as well as media analyses and academic journals. The findings of this research indicate that Armenia's normalization efforts were driven by several major factors: security threats, economic pressures, and political or diplomatic challenges posed by Türkiye. However, the study finds

that the influence of political or diplomatic threats was not as significant as the other two factors.

Keywords: *Normalization, Diplomatic, Threat, Security, Economic, Political*

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara Armenia dan Turki merupakan salah satu dinamika geopolitik yang paling kompleks dan sarat sejarah di kawasan Kaukasus. Keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang, terutama menyangkut peristiwa Genosida Armenia pada tahun 1915 yang dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman terhadap warga etnis Armenia.¹ Armenia dan komunitas internasional menganggap peristiwa tersebut sebagai genosida yang mengakibatkan kematian sekitar 1,5 juta orang Armenia, sedangkan Turki hingga kini menolak penggunaan istilah “genosida” dan menyebutnya sebagai bagian dari kekacauan akibat perang saudara di tengah Perang Dunia I.² Penyangkalan Turki terhadap peristiwa ini telah menjadi batu sandungan utama dalam hubungan bilateral kedua negara sejak Armenia merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991.³ Selain itu, keterlibatan Turki dalam mendukung Azerbaijan, yang merupakan musuh geopolitik utama Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh, turut memperparah hubungan kedua negara.⁴

Konflik Armenia dan Azerbaijan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh yang dihuni mayoritas etnis Armenia telah berlangsung sejak dekade 1980-an. Pada Perang Nagorno-Karabakh pertama (1988–1994), Armenia berhasil menguasai wilayah tersebut serta tujuh distrik sekitarnya yang secara hukum merupakan bagian dari Azerbaijan.⁵ Dukungan Turki terhadap Azerbaijan kemudian meningkat, dan sebagai bentuk solidaritas, Turki menutup perbatasannya dengan Armenia pada tahun 1993.⁶ Sejak saat itu, hubungan diplomatik antara Armenia dan Turki membeku. Meskipun pernah

¹ Taner Akçam, *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility* New York: Metropolitan Books, 2006.

² *Ibid.*

³ Richard Giragosian, “Armenia–Turkey Protocols: Success or Failure?” in *Caucasus Analytical Digest*, No. 15, Januari 2010.

⁴ Thomas de Waal, *Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War* New York University Press, 2013.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

ada upaya normalisasi melalui penandatanganan *Zurich Protocols* pada tahun 2009 yang dimediasi oleh Swiss, inisiatif tersebut gagal diimplementasikan akibat tekanan dari Azerbaijan dan oposisi domestik di Armenia dan Turki.⁷ Sejak saat itu, hubungan kedua negara tetap beku tanpa hubungan diplomatik resmi.

Ketegangan memuncak kembali pada tahun 2020 ketika pecah kembali Perang Nagorno-Karabakh kedua. Dalam konflik tersebut, Turki secara terbuka mendukung Azerbaijan baik secara diplomatik, militer, maupun teknologi.⁸ Turki menyediakan *drone* tempur Bayraktar TB2, pelatihan militer, serta dukungan logistik dan intelijen yang signifikan.⁹ Bahkan, beberapa laporan dari organisasi internasional mengindikasikan keterlibatan tentara bayaran dari Suriah yang diduga dikirim oleh Turki untuk membantu pasukan Azerbaijan, meskipun Ankara membantah keterlibatan tersebut.¹⁰ Dukungan terang-terangan Turki ini dipandang oleh Armenia sebagai bentuk agresi tidak langsung terhadap kedaulatannya, yang memperburuk persepsi ancaman dari Turki.

Namun, pasca-perang 2020, muncul dinamika baru yang membuka kemungkinan rekonsiliasi antara Armenia dan Turki. Pada akhir tahun 2021, kedua negara secara mengejutkan mengumumkan penunjukan utusan khusus untuk memulai dialog normalisasi hubungan. Pertemuan pertama antara kedua utusan berlangsung di Moskow pada Januari 2022, dengan mediasi dari Rusia.¹¹ Meski tidak menghasilkan kesepakatan konkret, proses ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan diplomatik Armenia terhadap Turki.¹² Armenia, yang sebelumnya sangat berhati-hati terhadap Turki, kini tampak lebih terbuka untuk menjajaki jalur dialog, termasuk kemungkinan pembukaan perbatasan dan pertukaran diplomatik resmi.

⁷ Richard Giragosian, "Armenia-Turkey Protocols: Success or Failure?" in *Caucasus Analytical Digest*, No. 15, Januari 2010.

⁸ *International Crisis Group*, "Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War," Report No. 264, December 2020.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Joshua Kucera, "Armenian, Turkish envoys meet for first talks on normalizing relations," *Eurasianet*, 14 Jan. 2022.

¹² Nikolai Atanassov, Maria Magarita, Mentzelopoulou dan Anita Orav, "Asylum, Borders and Migration: How the European Parliament is Responding to Citizen' Expectations." *Think Thank European Parliament* 26 April 2022.

Perubahan ini menarik untuk dianalisis dari perspektif keamanan dan strategi, khususnya mengingat Armenia adalah negara kecil yang secara militer dan ekonomi jauh lebih lemah dibandingkan Turki. Dalam konteks ini, konsep *bandwagoning* yang dikembangkan oleh Randall L. Schweller menjadi kerangka konsep yang relevan. Schweller membedakan antara negara yang menyeimbangkan (*balancer*) dan negara yang ikut terhadap ancaman (*bandwagoner*), dengan menyebut bahwa negara yang lemah cenderung *bandwagon* dengan kekuatan yang lebih besar bila mereka mendukung *status quo* dan tidak memiliki kapasitas untuk melawan secara langsung.¹³

Sejak inisiasi dialog normalisasi pada Januari 2022, hubungan Armenia dan Turki menunjukkan perkembangan yang lambat namun konsisten hingga tahun 2024. Upaya normalisasi ini terus berlangsung dalam konteks yang kompleks, ditandai dengan dinamika regional pasca-Perang Nagorno-Karabakh kedua dan realitas politik domestik masing-masing negara.¹⁴ Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, kedua utusan khusus Ruben Rubinyan dari Armenia dan Serdar Kılıç dari Turki mengadakan beberapa putaran pertemuan bilateral, termasuk di Wina dan Moskow. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sejumlah langkah teknis dan simbolik telah disepakati. Salah satunya adalah pembukaan penerbangan langsung antara Yerevan dan Istanbul, yang direalisasikan oleh maskapai Armenia *FlyOne* Armenia dan Turkish Airlines sejak awal 2022.¹⁵ Penerbangan ini tidak hanya menjadi simbol normalisasi, tetapi juga langkah praktis untuk memfasilitasi hubungan antar masyarakat sipil.

Selain itu, pada tahun 2023, kedua negara mencapai kesepakatan untuk membuka perbatasan darat secara terbatas bagi warga negara ketiga, yang dianggap sebagai kemajuan pragmatis dalam membangun kepercayaan.¹⁶ Langkah ini penting karena perbatasan darat Armenia–Turki

¹³ Schweller, Randall L. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In." *International Security*, vol. 19, no. 1, 1994, pp. 72

¹⁴ "Armenia, Turkey Special Envoys Agree to Continue Normalization Talks." *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 1 July 2022.

¹⁵ "Direct Flights Between Armenia and Turkey Resumed After 2 Years." *Al Jazeera*, 2 February 2022.

¹⁶ "Armenia-Turkey Border to Open for Third-Country Citizens." *Eurasianet*, 11 July 2023.

telah ditutup sejak 1993, dan pembukaan terbatas ini menunjukkan kemauan politik kedua pihak untuk bergerak maju meskipun tanpa pemulihan penuh hubungan diplomatik. Namun, proses ini juga diwarnai oleh sejumlah kendala dan kerapuhan. Salah satu tantangan utama adalah dinamika hubungan Armenia dengan Azerbaijan, terutama terkait status wilayah Nagorno-Karabakh pasca-perang. Turki menegaskan bahwa normalisasi penuh dengan Armenia tetap berkaitan erat dengan kemajuan dalam hubungan Armenia–Azerbaijan, terutama kesepakatan damai yang komprehensif.¹⁷ Posisi ini berulang kali ditegaskan oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan, yang menyatakan bahwa "perdamaian regional tidak dapat dicapai tanpa penyelesaian hubungan Armenia-Azerbaijan."

Di sisi lain, pemerintah Armenia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Nikol Pashinyan mencoba untuk memisahkan jalur negosiasi dengan Turki dari isu-isu bilateral dengan Azerbaijan, meskipun realitas geopolitik seringkali menyulitkan pendekatan ini. Armenia menganggap bahwa hubungan bilateral dengan Turki harus dapat berkembang secara independen sebagai bagian dari strategi normalisasi regional yang lebih luas.¹⁸

Pada tahun 2024, meskipun belum ada pembukaan penuh hubungan diplomatik atau perbatasan, retorika dari kedua belah pihak tetap relatif positif. Armenia terus menyatakan komitmennya terhadap proses normalisasi, sementara Turki juga menyampaikan kesiapan melanjutkan dialog. Meski demikian, faktor-faktor eksternal seperti mediasi Rusia yang melemah akibat perang di Ukraina, serta meningkatnya pengaruh aktor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, juga turut mempengaruhi dinamika normalisasi ini.¹⁹

Dengan demikian, periode 2022–2024 mencerminkan tahap negosiasi yang lebih stabil dan realistis dibandingkan upaya sebelumnya, namun masih dibayang-bayangi oleh tantangan geopolitik dan hambatan historis

¹⁷ Erdoğan, Recep Tayyip. "Turkey Wants Lasting Peace in South Caucasus." *Anadolu Agency*, 16 June 2023.

¹⁸ "Armenia Reiterates Readiness to Normalize Relations with Turkey." *Armenpress*, 22 November 2023.

¹⁹ *International Crisis Group. Improving Prospects for Armenia-Turkey Normalisation. Europe Report N°267*, 2023.

yang belum sepenuhnya terselesaikan. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun jalan menuju normalisasi penuh masih panjang, terdapat komitmen berkelanjutan dari kedua negara untuk menjaga saluran diplomatik tetap terbuka.²⁰

Dalam kajian hubungan internasional, *bandwagoning* merupakan sebuah konsep strategis yang menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional yang anarki. Berbeda dengan strategi *balancing* di mana negara berupaya menyeimbangkan atau menentang kekuatan yang dominan *bandwagoning* merujuk pada kecenderungan negara untuk justru bergabung atau mendekati kepada kekuatan yang dominan tersebut. Tujuan dari strategi ini bisa beragam, mulai dari menghindari ancaman hingga memperoleh keuntungan strategis, politik, atau ekonomi.²¹

Konsep ini banyak dibahas dalam ranah paradigma realis, khususnya dalam konsep yang dikembangkan oleh Randall L. Schweller. Dalam artikelnya "*Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In*" (1994), Schweller mengkritik pandangan klasik seperti Stephen Walt yang melihat *bandwagoning* hanya sebagai bentuk ketundukan negara lemah terhadap negara kuat karena adanya ancaman.²² Schweller memperluas konsep ini dengan mengemukakan bahwa negara juga dapat melakukan *bandwagoning* bukan hanya untuk bertahan (*survival*), tetapi juga untuk mengejar keuntungan (*profit*), terutama bagi negara yang bersifat *revisionist*, yaitu negara yang tidak puas dengan *status quo*.²³

Schweller membagi negara dalam beberapa kategori, seperti lambs (pendukung *status quo* dan tidak mampu mempertahankan diri), jackals (*revisionist* lemah yang oportunistik), dan lain-lain.²⁴ Dalam kerangka ini, *bandwagoning* dipahami bukan hanya sebagai pilihan pasif, melainkan sebagai kalkulasi strategis yang dapat mencerminkan rasionalitas dalam

²⁰ Giragosian, Richard. "Turkey and Armenia: The Long Road to Rapprochement." *European Council on Foreign Relations*, Policy Brief, January 2024.

²¹ Walt, Stephen M. *The Origins of Alliances*. Cornell University Press, 1987.

²² Schweller, Randall L. "*Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In*." *International Security*, vol. 19, no. 1, 1994, hlm. 72.

²³ *Ibid*, hlm 77

²⁴ *Ibid*, hlm 88

mempertahankan eksistensi atau memperbesar keuntungan negara dalam menghadapi tekanan eksternal atau perubahan tatanan kekuasaan.

Konsep ini menjadi penting dalam melihat bagaimana negara-negara kecil merespons dinamika geopolitik yang didominasi oleh kekuatan besar. Dalam konteks yang lebih luas, *bandwagoning* menunjukkan bagaimana keputusan luar negeri negara tidak selalu didasarkan pada prinsip resistensi atau aliansi kolektif, melainkan pada adaptasi terhadap realitas kekuasaan di sekitarnya.²⁵

Armenia dapat saja menyeimbangkan ancaman dari Turki, namun kenyataan menunjukkan bahwa Armenia justru memilih untuk menjalin dialog dan membuka kemungkinan rekonsiliasi. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa Armenia tengah menyesuaikan diri dengan dominasi regional Turki sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas internal dan eksistensi negaranya.

Fenomena ini menjadi titik awal dari pertanyaan utama dalam penelitian ini: “Mengapa Armenia melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki tahun 2020-2024?” Dengan menggunakan pendekatan *bandwagoning*, penelitian ini akan menelaah apa saja yang menjadi alasan Armenia dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki.

2. ALASAN ARMENIA MELAKUKAN NORMALISASI TERHADAP TURKI PADA TAHUN 2020-2024

2.1 Adanya Kerugian yang dialami Armenia dalam Melakukan Normalisasi.

Menurut Randall L. Schweller dalam *Bandwagoning* bahwasannya dijelaskan bahwa sebuah negara kecil atau lemah dikategorikan sebagai negara dengan *state interestnya* adalah *value of status quo (Lambs)*, karena menurut Schweller, *Lambs* melakukan *bandwagoning* bukan untuk ekspansi melainkan untuk bertahan hidup dan menghindari kerugian. Lalu dalam konsep *bandwagoning* Schweller juga menjelaskan negara dapat dikategorikan *Self-Abnegation* dalam *Goals-nya*, yang dimana negara lemah

²⁵ Walt, Stephen M. *The Origins of Alliances*. Cornell University Press, 1987.

rela mengorbankan kepentingan nasionalnya, identitas politiknya demi menghindari kerugian yang lebih besar. Terakhir Schweller menjelaskan bahwa negara dapat melakukan *Appeasement and Wave of the Future bandwagoning; Distancing*, berarti negara tersebut memilih menghindari konflik langsung (*appeasement*), lalu mengikuti kekuatan dominan baru (*wave of the future bandwagoning*), dan menjauh dari mitra lama yang sudah dirasa tidak efektif (*distancing*), semua hal ini selaras dengan *goals: self abnegation* yang berusaha bertahan dalam lingkungan yang keras dengan kekuatan terbatas.

Maka berdasarkan penjelasan Schweller dalam konsep *bandwagoning*, peneliti melihat Armenia sebagai negara kecil atau lemah yang ingin melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki pada tahun 2021, karena Armenia melihat Turki sebagai ancaman bagi Armenia. Karena Armenia melakukan normalisasi ini adalah untuk menghindari ancaman-ancaman langsung dari Turki yang dirasakan oleh Armenia, yang dimana ancaman-ancaman tersebut adalah ancaman keamanan, ekonomi, dan politik atau diplomatik.

2.2 ANCAMAN KEAMANAN YANG DIALAMI ARMENIA TERHADAP TURKI

Hubungan antara Armenia dan Turki telah lama dibayangi oleh konflik sejarah, rivalitas geopolitik, serta sengketa teritorial yang melibatkan Azerbaijan. Namun, dalam konteks tahun 2020 hingga 2024, ancaman keamanan yang dihadapi Armenia dari Turki mengalami peningkatan tajam, seiring dengan eskalasi konflik di wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam subbab ini, dijelaskan bagaimana konflik Nagorno-Karabakh dari akhir 1980-an hingga pecahnya perang besar pada tahun 2020 menjadi titik balik yang mengubah persepsi Armenia terhadap Turki, dari musuh historis menjadi ancaman strategis nyata yang memengaruhi kebijakan luar negeri Armenia.

Konflik Nagorno-Karabakh bermula dari ketegangan etnonasionalisme antara etnis Armenia dan Azerbaijan yang muncul di akhir 1980-an ketika Uni Soviet mulai melemah. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang secara administratif dimasukkan ke dalam Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, tetapi dihuni mayoritas etnis Armenia. Pada tahun 1988, dewan daerah Nagorno-Karabakh mengajukan permintaan untuk bergabung

dengan Armenia, yang memicu gelombang kekerasan antar etnis dan ketegangan politik yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata terbuka. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Armenia dan Azerbaijan terlibat dalam Perang Nagorno-Karabakh pertama (1988–1994). Armenia, bersama pasukan etnis Armenia di Karabakh, berhasil merebut wilayah tersebut serta tujuh distrik sekitarnya yang secara hukum merupakan bagian dari Azerbaijan. Konflik ini menyebabkan lebih dari 30.000 korban jiwa dan sekitar satu juta warga Azerbaijan menjadi pengungsi. Gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 1994 menghentikan pertempuran besar, namun tidak menyelesaikan status politik Nagorno-Karabakh, sehingga menciptakan *status quo* yang rapuh dan berpotensi meledak kembali kapan saja.²⁶

Ketegangan meningkat selama bertahun-tahun hingga akhirnya pada 27 September 2020, Azerbaijan melancarkan operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Armenia. Dalam perang yang berlangsung selama 44 hari ini, Azerbaijan menunjukkan kekuatan militer yang jauh lebih modern dan efektif dibandingkan sebelumnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan aktif Turki, yang secara terbuka mendukung Azerbaijan secara militer dan politik. Turki memberikan dukungan berupa pelatihan militer, logistik, dan terutama pengiriman *drone* tempur Bayraktar TB2 yang terbukti sangat efektif dalam menghancurkan sistem pertahanan udara Armenia. Selain itu, terdapat laporan kredibel yang menunjukkan bahwa Turki juga membantu merekrut dan memindahkan militan bayaran dari Suriah untuk bertempur di pihak Azerbaijan.²⁷

Kemenangan Azerbaijan yang cepat dan efektif sangat bergantung pada teknologi militer dan dukungan Turki, dimana Turki memberikan dukungan penuh dalam bentuk pelatihan militer, logistik, dan terutama pengiriman *drone* tempur Bayraktar TB2 yang terbukti sangat efektif dalam menghancurkan sistem pertahanan udara Armenia. Sedangkan Armenia sendiri masih mengandalkan sistem pertahanan konvensional dan dukungan

²⁶ De Waal, Thomas. *Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War*. New York University Press, 2013.

²⁷ International Crisis Group. *Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War*. Report No. 264, November 2021.

Rusia, mengalami kekalahan besar. Armenia kehilangan sebagian besar wilayah di sekitar Karabakh, termasuk kota strategis Shusha, dan terpaksa menandatangani perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia pada 10 November 2020.²⁸

Setelah kekalahan dalam Perang 2020, Armenia mengalami perubahan mendalam dalam persepsi terhadap Turki. Jika sebelumnya Turki dipandang sebagai musuh historis yang menjauh dari konflik Karabakh, kini Turki dianggap sebagai aktor militer langsung yang memiliki kepentingan strategis untuk melemahkan posisi Armenia di Kaukasus Selatan. Bentuk-bentuk ancaman yang dirasakan Armenia meliputi:

a. Keterlibatan Militer Langsung

Turki tidak lagi sekadar menjadi sekutu diplomatik Azerbaijan, melainkan mitra strategis militer. Keberhasilan penggunaan *drone*, keterlibatan penasihat militer, dan dugaan penggunaan militan bayaran membuat Armenia menyadari bahwa Turki memiliki kemampuan dan kemauan untuk melibatkan diri secara langsung dalam konflik yang merugikan kepentingan nasional Armenia.²⁹

b. Latihan Militer Gabungan dan Ancaman Teritorial

Setelah perang, Turki dan Azerbaijan secara berkala mengadakan latihan militer gabungan di sekitar wilayah perbatasan Armenia, termasuk di Eksklave Nakhchivan, yang terletak di barat daya Armenia. Latihan ini dipandang sebagai demonstrasi kekuatan dan bentuk tekanan psikologis dan militer langsung terhadap Armenia. Selain itu, Turki secara aktif mendorong proyek pembukaan *Zangezur Corridor*, jalur transportasi yang menghubungkan Azerbaijan dengan Nakhchivan melalui wilayah Armenia selatan. Armenia melihat proyek ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah, dan jika dipaksakan, dapat memicu eskalasi baru dalam konflik teritorial.³⁰

²⁸ Press Release: Statement by the Prime Minister of the Republic of Armenia, the President of the Republic of Azerbaijan and the President of the Russian Federation, [The Prime Minister of the Republic of Armenia](#), 10 November 2020.

²⁹ Shiriyev, Zaur. *Nagorno-Karabakh's Gathering War Clouds: Azerbaijan's Perspective*. Carnegie Endowment for International Peace, 2020.

³⁰ Shiriyev, Zaur. *Nagorno-Karabakh's Gathering War Clouds: Azerbaijan's Perspective*. Carnegie Endowment for International Peace, 2020.

Menurut konsep *bandwagoning* Randall L. Schweller, Armenia adalah negara lambas memiliki nilai *status quo* yang tinggi (keselamatan bangsa), namun dengan tujuan defensif (*Self-Abnegation*). Pendekatan ini mendorong strategi *appeasement* dan *wave-of-the-future distancing*, yaitu meraih kedekatan dengan kekuatan dominan (Turki) untuk meredam ancaman.

Maka dari itu peneliti melihat respon Armenia dengan adanya ancaman-ancaman tersebut, Armenia mengurangi risiko keamanan melalui pendekatan diplomatik dalam konsep *bandwagoning* dari Schweller, berarti bentuk diplomasi disini dalam artian sebagai “*Self-Abnegation*” atau penerimaan dominasi pihak yang lebih kuat untuk menghindari kerugian lebih besar yang dipilih oleh Armenia. Pendekatan ini bertujuan untuk membuka saluran dialog yang dapat membatasi intensitas ancaman militer.

Dengan adanya normalisasi, Armenia berharap Turki akan lebih menahan diri dalam memberikan dukungan militer terhadap Azerbaijan, serta mengurangi frekuensi latihan militer gabungan yang bersifat provokatif di sekitar perbatasan Armenia.³¹ Lalu Armenia melakukan pencegahan seperti menjaga integritas wilayah nasional seperti pada proyek *Zangezur Corridor*, yang didorong oleh Turki dan Azerbaijan, menjadi salah satu isu paling sensitif bagi Armenia. Koridor ini jika direalisasikan tanpa kontrol penuh oleh pemerintah Armenia akan menjadi bentuk pelanggaran kedaulatan dan dapat memicu konfrontasi langsung. Dalam kondisi militer dan diplomatik yang lemah, Armenia tidak berada dalam posisi untuk sepenuhnya menolak tuntutan tersebut melalui kekuatan keras.³²

Dengan melakukan normalisasi hubungan, Armenia berharap dapat membentuk ruang negosiasi terkait infrastruktur lintas batas ini agar tidak mengancam integritas wilayahnya.³³ Pendekatan diplomatik memungkinkan Armenia untuk duduk di meja perundingan secara formal dan menekan narasi dominan Azerbaijan-Turki dari dalam, bukan dari luar sistem yang dibentuk kedua negara tersebut.

³¹ Ministry of Foreign Affairs of Armenia. “Statement on Normalization with Turkey.” *MFA.am*, 2022.

³² International Crisis Group. “Post-War Prospects for Nagorno-Karabakh.” *Europe Report N°264*, 2021.

³³ “President Erdoğan Rejects Armenian Genocide Label Again.” *Al Jazeera*, 24 April 2021.

Hingga tahun 2024, kondisi keamanan Armenia tetap berada dalam situasi rapuh. Armenia masih menghadapi tekanan dari Azerbaijan dan secara tidak langsung dari Turki, terutama terkait isu *Zangezur Corridor*, yang didorong oleh Baku dan didukung oleh Ankara sebagai jalur transit dari Nakhchivan ke Azerbaijan barat melalui wilayah Armenia. Armenia menolak jalur tersebut jika bersifat "eksklusif" dan dikontrol Turki-Azerbaijan, karena hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.³⁴ Armenia juga tetap mewaspadaikan aktivitas militer gabungan Turki-Azerbaijan yang terus dilakukan secara rutin setiap tahun, seperti latihan militer "*TurAz Eagle*" yang memperlihatkan simulasi perang terbuka di wilayah Kaukasus Selatan. Meski demikian, Armenia belum menunjukkan kapasitas militer baru yang signifikan, dan cenderung mengandalkan strategi keamanan non-konfrontatif.

Maka menurut peneliti dengan memperhatikan kerentanan keamanan yang dialami Armenia pasca Perang Nagorno-Karabakh 2020, respons negara tersebut terhadap Turki menunjukkan pola yang selaras dengan klasifikasi bandwagoning menurut Randall L. Schweller. Armenia dapat dikategorikan sebagai *Lambs*, yakni negara dengan orientasi *status quo* yang berupaya mempertahankan keberlangsungan hidupnya di tengah dominasi kekuatan besar. Keputusan Armenia untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Turki bukan merupakan tanda penerimaan terhadap dominasi Turki-Azerbaijan, tetapi lebih merupakan strategi bertahan hidup dalam lingkungan strategis yang tidak bersahabat.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga menunjukkan pola *Self-Abnegation*, di mana Armenia memilih untuk mengorbankan sebagian klaim dan posisi historisnya demi menghindari konfrontasi militer lanjutan yang bisa membawa kehancuran lebih besar. Dengan normalisasi, Armenia berharap dapat menekan kemungkinan intervensi militer Turki dan membuka jalur komunikasi yang lebih stabil. Armenia juga menerapkan strategi *Appeasement*, yakni dengan secara sadar menurunkan eskalasi dan mengadopsi kebijakan kompromi demi keamanan nasional. Ketiga pola ini

³⁴ Eurasianet. "Armenia Pushes Back on Corridor Demands." *Eurasianet.org*, 10 Mar. 2023,

menjelaskan bahwa ancaman keamanan menjadi pendorong utama Armenia untuk melakukan normalisasi, dalam kerangka strategi defensif dan adaptif demi kelangsungan negara.

2.3 ANCAMAN EKONOMI YANG DIALAMI ARMENIA TERHADAP TURKI

Selain ancaman militer, Armenia juga menghadapi tekanan signifikan dalam bentuk ancaman ekonomi dari Turki, yang telah berlangsung sejak dekade 1990-an namun mencapai intensitas baru pasca-Perang Nagorno-Karabakh tahun 2020. Ancaman ini berasal dari kombinasi kebijakan penutupan perbatasan, pemutusan jalur perdagangan, serta pengaruh regional Turki dalam mengendalikan konektivitas dan infrastruktur lintas batas. Dalam situasi pascaperang yang rapuh, ancaman ekonomi tersebut tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan nasional Armenia, tetapi juga mempersempit ruang kebijakan luar negeri negara tersebut. Armenia pun menghadapi dilema antara bertahan dalam isolasi atau membuka dialog normalisasi demi kelangsungan ekonomi nasional.³⁵

Sejak tahun 1993, menyusul pendudukan Armenia atas wilayah-wilayah Azerbaijan selama Perang Nagorno-Karabakh pertama, Turki secara sepihak menutup perbatasan daratnya dengan Armenia. Langkah ini merupakan bentuk solidaritas dengan Azerbaijan dan menjadi bagian dari strategi regional Turki untuk menekan Armenia secara ekonomi dan diplomatik.³⁶ Penutupan ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan darat yang vital, dan hingga hari ini, Armenia tetap menjadi satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki hubungan diplomatik maupun jalur perdagangan terbuka dengan Turki. Sebagai negara terkurung daratan (*landlocked*), Armenia sangat bergantung pada akses lintas batas untuk menyalurkan barang dan jasa ke pasar regional dan internasional. Penutupan perbatasan dengan Turki memaksa Armenia untuk mengandalkan jalur yang lebih jauh dan mahal melalui Georgia dan Iran,

³⁵ Giragosian, Richard. "Armenia's Strategic u-turn. European Council on Foreign Relations." Policy Memo 22 (2014).

³⁶ "Turkey Closes Border with Armenia." *BBC News*, 3 April 1993.

sehingga meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya saing produk ekspor Armenia.³⁷

Penutupan perbatasan dan hubungan diplomatik yang membeku juga menyebabkan isolasi ekonomi jangka panjang bagi Armenia dari proyek-proyek integrasi regional. Turki, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, menjadi salah satu pusat perdagangan dan transportasi yang penting, namun Armenia justru terputus dari dinamika tersebut. Contohnya, Armenia tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proyek-proyek besar seperti *Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline* (TANAP) atau Baku-Tbilisi-Kars railway, yang menghubungkan Asia Tengah dengan Eropa melalui Turki dan Azerbaijan.³⁸ Armenia secara sistematis tersisih dari infrastruktur energi dan transportasi regional, menyebabkan kehilangan potensi investasi dan pendapatan negara.³⁹ Isolasi ini bukan hanya soal jalur fisik, tetapi juga mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas dan konektivitas ekonomi Armenia. Dalam jangka panjang, situasi ini membatasi pembangunan ekonomi nasional dan memperbesar ketergantungan Armenia terhadap Rusia sebagai mitra ekonomi utama suatu kondisi yang semakin rapuh sejak Rusia terlibat dalam konflik Ukraina dan mengalami sanksi internasional.

Turki merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Eurasia dan anggota G20. Dengan produk domestik bruto yang jauh lebih tinggi serta basis industri dan perdagangan yang luas, Turki memiliki kapasitas ekonomi untuk memengaruhi harga pasar, jalur distribusi, dan relasi perdagangan di kawasan, termasuk terhadap negara-negara kecil seperti Armenia.⁴⁰ Armenia sendiri memiliki ekonomi yang jauh lebih kecil, dan dalam kondisi normal pun berada dalam posisi yang lemah secara struktural. Dalam laporan tahunan oleh Bank Dunia, Armenia dikategorikan sebagai negara dengan ekonomi berkembang menengah ke bawah, dengan

³⁷ International Crisis Group. *Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War*. Report No. 264, 2021.

³⁸ Cornell, Svante E. "The Baku-Tbilisi-Kars Railway and its Geopolitical Implications." *Silk Road Paper*, Central Asia-Caucasus Institute, 2018.

³⁹ Broers, Laurence. "After the War: A New Reality in the South Caucasus." *Chatham House*, 2021.

⁴⁰ "Turkey Overview." *World Bank*, 2023.

tingkat ketergantungan tinggi terhadap remitansi dan ekspor bahan mentah.⁴¹

Dalam kondisi seperti itu, ancaman ekonomi dari Turki tidak selalu muncul dalam bentuk embargo formal, tetapi juga dari eksklusi sistematis dan penolakan untuk bekerja sama secara multilateral. Hal ini memperkuat persepsi Armenia bahwa tidak menjalin hubungan ekonomi dengan Turki justru semakin melemahkan daya saing nasionalnya di tengah kompetisi regional yang makin tajam. Kekalahan Armenia dalam Perang 2020 membawa konsekuensi serius tidak hanya secara geopolitik, tetapi juga dalam dimensi ekonomi. Armenia menghadapi:

- a. Peningkatan pengeluaran militer dan keamanan, yang mengalihkan anggaran dari sektor pembangunan.⁴²
- b. Menurunnya kepercayaan investor asing, terutama karena ketidakstabilan politik dan keamanan pasca-perang.⁴³

Sejak 1993, Turki telah menutup perbatasannya dengan Armenia, sebagai bentuk solidaritas terhadap Azerbaijan. Penutupan ini menjadi bagian dari strategi tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Armenia, yang menyebabkan isolasi regional dan meningkatkan ketergantungan Armenia terhadap Rusia dan Iran. Setelah kekalahan tahun 2020 dan menurunnya dukungan nyata Rusia (terutama setelah Rusia terlibat dalam Perang Ukraina), Armenia semakin menyadari bahwa ketergantungan terhadap satu aktor besar tidak cukup. Dalam kondisi ini, ancaman dari Turki tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari ketidakseimbangan dalam konektivitas ekonomi dan akses regional.

Penutupan perbatasan darat Armenia–Turki selama lebih dari tiga dekade telah menekan intensitas perdagangan bilateral ke titik minimal, pada 2021 kontribusi Turki hanya 0,9% terhadap total perdagangan Armenia, jauh di bawah rerata 4% pada 2017–2019 dan tercatat menurun

⁴¹ “Armenia Country Profile.” *World Bank*, 2023.

⁴² Hakobyan, Tatul. “Armenia’s Post-War Budget Priorities: Guns over Butter.” *CivilNet*, 2021.

⁴³ “Armenia Investment Climate Statement.” *U.S. Department of State*, 2023.

68% khusus pada sisi impor akibat larangan sementara barang asal Turki yang diberlakukan Yerevan tahun itu.⁴⁴

Berdasarkan Analisis dari *German Economic Team* memperkirakan bahwa, jika koridor lintas-batas kembali dibuka, struktur perdagangan akan terkoreksi drastis, model gravitasi menunjukkan potensi jangka panjang di mana Turki seharusnya meraih porsi 12% dalam perdagangan Armenia, sedangkan model komplementaritas untuk horizon jangka pendek-menengah memproyeksikan ekspor Armenia ke Turki melonjak ke USD 185 juta (6,7% ekspor 2021) dan impor Armenia dari Turki menembus USD 678 juta (12,8% impor 2021).⁴⁵ Dengan demikian, volume transaksi dua arah diperkirakan dapat naik dari < 1% menjadi > 10% pangsa perdagangan nasional, terutama melalui lonjakan pembelian mesin-peralatan, tekstil, serta obat-obatan, sembari membuka ceruk ekspor baru bagi produk agro-pangan, tembakau, perhiasan kaca, dan bijih tembaga.⁴⁶ Temuan ini menegaskan bahwa normalisasi logistik lintas-batas bukan sekadar langkah politis, melainkan instrumen strategis untuk diversifikasi mitra dagang dan peningkatan kapabilitas industri domestik Armenia.

Penutupan perbatasan oleh Turki sejak 1993 telah menjadi bentuk isolasi yang berdampak negatif bagi perekonomian Armenia. Ketergantungan terhadap Rusia dan Iran menjadi konsekuensi dari situasi tersebut. Namun, setelah tahun 2022, dengan Rusia sibuk dalam Perang Ukraina dan semakin melemahnya peran Rusia di wilayah Kaukasus Selatan, Armenia menyadari bahwa terlalu mengandalkan satu mitra strategis adalah kebijakan yang tidak berkelanjutan.

Dengan membuka kembali perbatasan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Turki, Armenia mencoba untuk mengurangi kerugian ekonomi yang bersumber dari keterisolasian regional. Ini juga menjadi bentuk strategi “*wave-of-the-future bandwagoning*,” yaitu merapat ke kekuatan yang dinilai akan dominan di masa depan, dalam hal ini Turki dan

⁴⁴ Movchan, Veronika. “*Opening of Armenia–Turkey Border: Trade Impact.*” *German Economic Team Newsletter*, no. 5, May–June 2022.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

konektivitas ekonominya di wilayah Kaukasus dan Asia Tengah.⁴⁷ Selain itu, hubungan ekonomi dengan Turki dan negara-negara transit lainnya juga diharapkan mengurangi ketergantungan struktural terhadap Rusia, hal ini relevan dengan konsep *bandwagoning* dari Scheweller yaitu *distancing* yang dimana suatu negara meninggalkan mitra lama yang sudah tidak efisien ke mitra baru yang lebih efisien, yang dimana hal ini memberi Armenia keleluasaan strategis lebih besar di masa depan.

Meskipun proses ini menghadapi banyak tantangan baik dari oposisi domestik maupun dari diaspora Armenia namun urgensi ekonomi membuat pemerintah Armenia mulai mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap kompromi.⁴⁸

Maka dari itu Peneliti melihat keputusan Armenia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Turki sangat dipengaruhi oleh isolasi ekonomi yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Armenia menyadari bahwa keterisolasian dari jaringan ekonomi regional bukan hanya memperlemah daya saing nasionalnya, tetapi juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap aktor tunggal seperti Rusia yang peran strategisnya mulai menurun sejak 2022, dan mulai menaikkan ketergantungannya terhadap Turki. Dalam konteks ini, strategi Armenia mencerminkan kategori *Self-Abnegation*, karena negara tersebut bersedia menurunkan resistensinya terhadap kerja sama dengan Turki, demi akses terhadap pasar, investasi, dan logistik regional yang lebih luas.

Selain itu, keputusan Armenia untuk mulai merapat ke Turki sebagai kekuatan ekonomi dominan di kawasan Eurasia juga merupakan bentuk dari *Wave of the Future Bandwagoning*, yakni pengakuan terhadap perubahan konstelasi kekuatan regional dan keinginan untuk berada di sisi pihak yang dinilai lebih prospektif. Dalam waktu yang sama, Armenia juga menunjukkan gejala *Distancing*, yaitu menjauh secara perlahan dari ketergantungan struktural terhadap Rusia, karena efektivitas dukungan Rusia semakin dipertanyakan dalam konteks pasca-Perang Ukraina. Melalui kombinasi

⁴⁷ International Crisis Group. "Post-War Prospects for Nagorno-Karabakh." *Europe Report* N°264, 2021.

⁴⁸ International Crisis Group. *Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War*. Report No. 264, 2021.

ketiga pola ini, tampak bahwa ancaman ekonomi dari Turki bukan hanya memaksa Armenia bertahan, tetapi juga mengubah orientasi strategisnya ke arah yang lebih fleksibel dan pragmatis.

2.4 ANCAMAN POLITIK DAN DIPLOMATIK YANG DIALAMI ARMENIA TERHADAP TURKI

Perang Nagorno-Karabakh Kedua yang pecah pada 27 September 2020 menjadi titik balik yang memperkuat persepsi Armenia terhadap Turki bukan hanya sebagai mitra Azerbaijan, tetapi sebagai aktor langsung yang secara aktif terlibat dalam memperlemah posisi politik dan diplomatik Armenia. Selain memberikan dukungan militer kepada Azerbaijan berupa *drone*, pelatihan, dan intelijen, Turki juga secara aktif mempromosikan narasi bahwa wilayah Nagorno-Karabakh adalah bagian tak terpisahkan dari Azerbaijan, dan bahwa Armenia adalah agresor.⁴⁹ Turki juga menggunakan saluran-saluran diplomatik internasional untuk memblokir upaya Armenia dalam mendapatkan dukungan internasional, misalnya melalui *Organization of Islamic Cooperation* (OIC), di mana Turki secara konsisten mempromosikan resolusi anti-Armenia.⁵⁰ Pengaruh Turki juga terlihat dalam tekanan terhadap negara ketiga, seperti Pakistan, yang tidak mengakui Armenia sebagai negara, serta beberapa negara Teluk yang enggan bekerja sama dengan Armenia karena tekanan diplomatik Turki.⁵¹

Penutupan perbatasan darat Armenia-Turki sejak 1993 tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menciptakan blokade politik. Armenia terjebak dalam isolasi regional, tidak dapat mengakses secara langsung proyek-proyek konektivitas regional seperti *Middle Corridor*, Koridor Energi, dan berbagai forum transportasi yang digagas oleh Turki dan Azerbaijan bersama negara-negara Asia Tengah.⁵² Kondisi ini menurunkan posisi tawar Armenia dalam diplomasi regional. Misalnya, dalam proyek "*Zangezur Corridor*", Turki mendesak Armenia untuk membuka jalur transportasi darat

⁴⁹ Öztüğ, Laçın İdil. "A Comparative Analysis of Turkish Foreign Policy on the Azerbaijan-Armenia Conflicts (1988–2020)." *Insight Turkey*, vol. 25, no. 2, 2023, pp. 139.

⁵⁰ Organization of Islamic Cooperation, Final Resolutions of Political Affairs, 50th Council of Foreign Ministers, 2024, hlm. 34

⁵¹ European Parliament. "Resolution on Armenian Genocide Recognition." 2021.

⁵² Azizi, Hamidreza, dan Daria Isachenko. *Zangezur Corridor: Strategic Dilemmas for Armenia and Iran*. SWP Berlin, 2023.

yang menghubungkan Azerbaijan dengan eksklave Nakhchivan melalui wilayah selatan Armenia. Armenia menilai proposal tersebut sebagai bentuk tekanan politik yang mengancam integritas wilayahnya.⁵³

Selain aspek militer dan ekonomi, Turki juga dianggap sebagai ancaman dalam dimensi identitas historis. Penolakan resmi pemerintah Turki untuk mengakui Genosida Armenia tahun 1915 tetap menjadi isu sensitif dan sumber luka historis nasional Armenia. Presiden Recep Tayyip Erdoğan berulang kali menyatakan bahwa tuduhan genosida adalah propaganda politik, yang oleh rakyat Armenia dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap eksistensi kolektif dan memori nasional mereka.⁵⁴

Di tingkat simbolik, Turki secara konsisten menyangkal terjadinya Genosida Armenia tahun 1915, yang merupakan bagian penting dari identitas nasional dan sejarah kolektif Armenia. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyebut narasi genosida sebagai “distorsi sejarah”, dan menyatakan bahwa peristiwa 1915 merupakan tragedi bersama yang tidak dapat dikategorikan sebagai genosida.⁵⁵ Armenia menganggap penyangkalan ini bukan hanya sebagai penghinaan historis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap legitimasi diplomatiknya di panggung internasional.

Penolakan Turki terhadap pengakuan Genosida Armenia tetap menjadi luka historis yang terbuka. Namun demikian, Armenia kini menyadari bahwa menghadapi penyangkalan tersebut melalui konfrontasi langsung tidak memberikan hasil signifikan dan justru memperkeruh hubungan yang sudah rapuh. Alih-alih melanjutkan pendekatan konfrontatif, Armenia mulai menempuh jalur diplomatik untuk menurunkan tensi simbolik.⁵⁶

Maka dari itu Peneliti melihat ancaman politik dan diplomatik dari Turki juga menjadi elemen penting yang mendorong Armenia untuk menempuh jalur normalisasi. Dari sisi retorika dan simbolisme politik, Turki secara konsisten menolak pengakuan Genosida Armenia dan aktif melemahkan posisi diplomatik Armenia di forum internasional. Namun, alih-

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Akçam, Taner. *The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire*. Princeton University Press, 2012.

⁵⁵ Anadolu Agency. “President Erdoğan Rejects Genocide Allegations.” 24 April 2021.

⁵⁶ Ministry of Foreign Affairs of Armenia. “Statement on Establishment of Armenia-Turkey Historical Dialogue Commission.” *MFA.am*, 2022.

alih melawan melalui jalur konfrontatif, Armenia memilih jalur yang lebih lunak dan pragmatis. Hal ini menunjukkan bentuk *Self-Abnegation* yang khas, yakni kesediaan untuk menanggukkan sebagian narasi historisnya demi membuka ruang diplomasi dan memperbaiki posisi tawar dalam jangka panjang.

Pendekatan ini juga mencerminkan strategi *Appeasement*, karena Armenia memilih untuk tidak memperbesar konflik simbolik yang tidak berdampak langsung terhadap *survival* negara. Strategi diplomatik Armenia dalam isu-isu historis, seperti usulan pembentukan komisi sejarah bersama dengan Turki, juga mencerminkan keinginan untuk membangun kepercayaan, bukan memaksakan pengakuan secara sepihak. Hal ini menegaskan bahwa Armenia tidak mengabaikan nilai-nilai nasionalnya, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi geopolitik yang menuntut keluwesan strategi. Dengan demikian, ancaman politik dan diplomatik dari Turki telah mendorong Armenia untuk mengambil langkah kompromi dalam konsep *bandwagoning*, demi menciptakan stabilitas eksternal yang dibutuhkan untuk konsolidasi internal.

3. KESIMPULAN

Alasan dibalik Armenia melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki pada tahun 2021 dikarenakan Armenia ingin menghindari kerugian yang lebih besar dari ancaman yang diberikan oleh Turki. Ancaman Turki terhadap Armenia tersebut seperti ancaman keamanan, ekonomi dan politik, yang dimana ancaman tersebut memberikan kerugian besar bagi Armenia. Namun dari ketiga ancaman tersebut, ancaman keamanan dan ekonomi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan ancaman politik dalam mendorong Armenia melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki 2021.

Alasan ancaman keamanan lebih memiliki pengaruh besar adalah dikarenakan dengan ancaman keamanan tersebut mengganggu kedaulatan dari Armenia, dimana Turki memberikan dukungan penuh terhadap Azerbaijan untuk melawan Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh, dukungan penuh tersebut seperti bentuk pelatihan militer, logistik, dan

terutama pengiriman *drone* tempur Bayraktar TB2 yang terbukti sangat efektif dalam menghancurkan sistem pertahanan udara Armenia.

Sedangkan alasan ancaman ekonomi memiliki pengaruh besar juga adalah dikarenakan dengan ancaman ekonomi tersebut mengganggu stabilitas ekonomi Armenia, yang dimana ancaman yang dialami oleh Armenia adalah kombinasi kebijakan penutupan perbatasan, pemutusan jalur perdagangan, serta pengaruh regional Turki dalam mengendalikan konektivitas dan infrastruktur lintas batas. Adapun dampak lain yang dirasakan oleh Armenia salah satunya adalah menurunnya kepercayaan investor asing, terutama karena ketidakstabilan keamanan dan politik pasca-perang.

Namun pengaruh dari ancaman politik tidaklah sebesar atau signifikan dengan kedua ancaman lainnya dalam mendorong Armenia melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan, secara historis tekanan politik dari Turki terhadap Armenia lebih bersifat simbolis dan diplomatis, seperti penyangkalan atas Genosida Armenia dan dukungan politik terhadap posisi Azerbaijan di forum internasional. Walaupun hal ini berdampak pada isolasi diplomatik Armenia, namun tidak secara langsung mengancam kelangsungan negara atau kestabilan internal Armenia seperti halnya ancaman militer dan ekonomi. Maka dari hal tersebut peneliti melihat bahwa pengaruh dari ancaman politik tidak sebesar pengaruh dari kedua ancaman lainnya dalam mendorong Armenia melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Turki tahun 2021.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Akçam, Taner. *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility*. Metropolitan Books, 2006.

Akçam, Taner. *The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire*. Princeton University Press, 2012.

De Waal, Thomas. *Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War*. New York University Press, 2013.

Walt, Stephen M. *The Origins of Alliances*. Cornell University Press, 1987.

JURNAL/ARTIKEL

Atanassov, Nikolai, Maria Magarita Mentzelopoulou, and Anita Orav.

“Asylum, Borders and Migration: How the European Parliament is Responding to Citizens’ Expectations.” *Think Tank European Parliament*, 26 Apr. 2022.

Azizi, Hamidreza, and Daria Isachenko. *Zangezur Corridor: Strategic Dilemmas for Armenia and Iran*. SWP Berlin, 2023.

Broers, Laurence. “After the War: A New Reality in the South Caucasus.” *Chatham House*, 2021.

Cornell, Svante E. “The Baku-Tbilisi-Kars Railway and Its Geopolitical Implications.” *Silk Road Paper*, Central Asia-Caucasus Institute, 2018.

Giragosian, Richard. “Armenia–Turkey Protocols: Success or Failure?” *Caucasus Analytical Digest*, no. 15, Jan. 2010.

Giragosian, Richard. “Armenia’s Strategic U-turn.” *European Council on Foreign Relations*, Policy Memo 22, 2014.

Giragosian, Richard. “Turkey and Armenia: The Long Road to Rapprochement.” *European Council on Foreign Relations*, Policy Brief, Jan. 2024.

Hakobyan, Tatul. “Armenia’s Post-War Budget Priorities: Guns over Butter.” *CivilNet*, 2021.

International Crisis Group. *Post-War Prospects for Nagorno-Karabakh*. *Europe Report* No. 264, 2021.

Movchan, Veronika. “Opening of Armenia–Turkey Border: Trade Impact.” *German Economic Team Newsletter*, no. 5, May–June 2022.

Öztiğ, Laçin İdil. “A Comparative Analysis of Turkish Foreign Policy on the Azerbaijan–Armenia Conflicts (1988–2020).” *Insight Turkey*, vol. 25, no. 2, 2023, pp. 139.

Organization of Islamic Cooperation. *Final Resolutions of Political Affairs*. 50th Council of Foreign Ministers, 2024, p. 34.

Schweller, Randall L. “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In.” *International Security*, vol. 19, no. 1, 1994, pp. 72–107.

Shiriyev, Zaur. *Nagorno-Karabakh's Gathering War Clouds: Azerbaijan's Perspective*. Carnegie Endowment for International Peace, 2020.

WEBSITE/BERITA

“Armenia, Turkey Special Envoys Agree to Continue Normalization Talks.” *Radio Free Europe/Radio Liberty*, 1 July 2022.

“Armenia Reiterates Readiness to Normalize Relations with Turkey.” *Armenpress*, 22 Nov. 2023.

“Direct Flights Between Armenia and Turkey Resumed After 2 Years.” *Al Jazeera*, 2 Feb. 2022.

“President Erdoğan Rejects Armenian Genocide Label Again.” *Al Jazeera*, 24 Apr. 2021.

“Turkey Closes Border with Armenia.” *BBC News*, 3 Apr. 1993, www.bbc.com/news.

Erdoğan, Recep Tayyip. “Turkey Wants Lasting Peace in South Caucasus.” *Anadolu Agency*, 16 June 2023.

Anadolu Agency. “President Erdoğan Rejects Genocide Allegations.” *Anadolu Agency*, 24 Apr. 2021.

Kucera, Joshua. “Armenian, Turkish Envoys Meet for First Talks on Normalizing Relations.” *Eurasianet*, 14 Jan. 2022.

“Armenia Pushes Back on Corridor Demands.” *Eurasianet.org*, 10 Mar. 2023, www.eurasianet.org/armenia-pushes-back-on-corridor-demands.

Hakobyan, Tatul. “Armenia’s Post-War Budget Priorities: Guns over Butter.” *CivilNet*, 2021.

Giragosian, Richard. “Turkey and Armenia: The Long Road to Rapprochement.” *European Council on Foreign Relations*, 2024.

International Crisis Group. *Improving Prospects for Peace after the Nagorno-Karabakh War*. *Europe Report*, 2020.